

Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Berbasis E-Government di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Rheina Adinda Zahrani,

Isnaini Rodiyah

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April, 2026

Pendahuluan

Pengelolaan aset desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola aset secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pengelolaan aset desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menegaskan bahwa pengelolaan aset harus dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pada praktiknya pengelolaan aset desa masih banyak dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan pembaruan data, serta risiko kehilangan dokumen.

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemerintah mengembangkan sistem berbasis teknologi melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendorong penerapan e-government, salah satunya melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan, pengelolaan, hingga pelaporan aset desa secara digital.

Namun, implementasi SIPADES di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo belum berjalan optimal. Kondisi wilayah yang terdampak bencana lumpur Lapindo menyebabkan keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet, sehingga mempengaruhi efektivitas penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi SIPADES serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana implementasi kebijakan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) berbasis e-government di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Ketapang. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pemerintah Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pengelolaan SIPADES, meliputi Pj Kepala Desa, Sekretaris Desa sebagai operator, dan Kaur Keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Ketapang belum berjalan secara optimal. Meskipun aplikasi ini telah digunakan sebagai sarana pengelolaan aset desa berbasis digital, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.

Secara umum, SIPADES telah membantu pemerintah desa dalam proses pencatatan dan pengelolaan aset menjadi lebih terstruktur dibandingkan dengan sistem manual. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan seperti hilangnya data aset pada saat pembaruan sistem, keterbatasan akses jaringan internet, serta pengelolaan aplikasi yang masih terpusat pada satu operator.

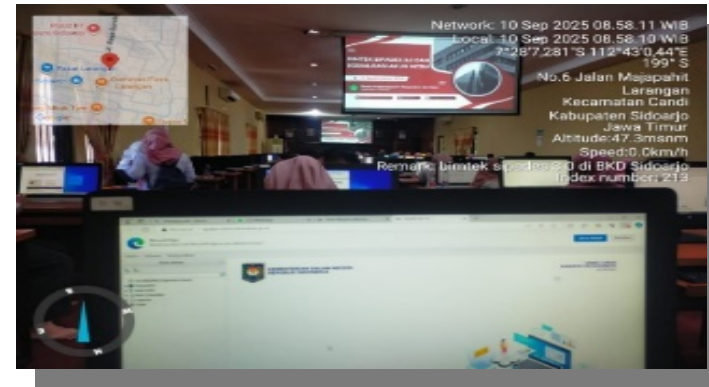
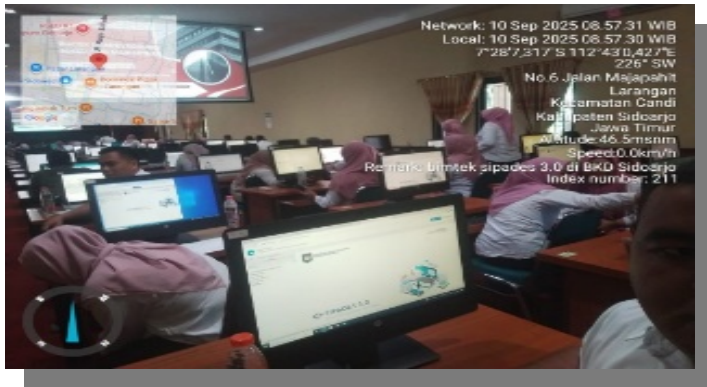
Selain itu, masih terdapat sejumlah aset desa yang belum dapat diinput ke dalam sistem karena kondisi fisik aset yang terdampak bencana lumpur Lapindo, sehingga proses pendataan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Dengan demikian, implementasi SIPADES di Desa Ketapang telah menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan aset desa, namun belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan perbaikan pada aspek teknis maupun administratif.

Pembahasan

1. KOMUNIKASI

Komunikasi dalam implementasi SIPADES di Desa Ketapang menunjukkan hasil yang belum optimal. Pada tahap awal, sosialisasi SIPADES versi 2.0 sudah membantu perangkat desa memahami fungsi dan tujuan penggunaan aplikasi. Saat pembaruan ke versi 3.0, komunikasi tidak berjalan secara konsisten dan tidak disertai dengan pendampingan teknis yang memadai. Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala, seperti kesulitan mengakses sistem dan hilangnya data aset yang sebelumnya telah diinput. Situasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah sebagai pengembang kebijakan dengan pelaksana di tingkat desa masih belum efektif, sehingga berdampak pada pelaksanaan SIPADES yang belum berjalan optimal.



Pembahasan

2. SUMBER DAYA

NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
Widya Helita	Pj Kepala Desa Ketapang	S2
Imam Fakhruddin, S.AP	Sekretaris Desa	S1
Moh. Aiyub	Kasi Pemerintahan	SLTA
Ubait Annajmussyakib	Kasi Kemasyarakatan	SLTA
Inge	Kasi Pelayanan	SLTA
Mokhamad Munif	Kaur Perencanaan	SLTA
Alifatur Rosyidah	Kaur Keuangan	D3
Dyana Puspita Sari	Kaur TU dan Umum	SMA
Su'udin	Kasun Gondang	SLTA

JENIS	JUMLAH	KONDISI
Komputer	5	Baik
Laptop	4	Baik
Printer	6	Baik
LCD	1	Baik
Antena Tower Wifi Triange	1	Baik

Sumber daya dalam implementasi SIPADES di Desa Ketapang mencakup sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Dari sisi sumber daya manusia, perangkat desa dinilai sudah cukup mampu dalam mengoperasikan aplikasi, khususnya Sekretaris Desa sebagai operator utama yang memiliki pemahaman dasar terkait penggunaan sistem. Kemampuan tersebut belum didukung oleh penguasaan teknis secara menyeluruh karena pelatihan lanjutan masih terbatas. Kondisi ini membuat pemanfaatan fitur dalam aplikasi belum berjalan maksimal. Dari sisi sarana dan prasarana, perangkat seperti komputer, laptop, dan printer telah tersedia dalam kondisi baik. Kendala utama terletak pada jaringan internet yang belum stabil akibat dampak bencana lumpur Lapindo, sehingga proses input dan pengelolaan data sering terhambat. Ketiadaan alokasi anggaran khusus untuk operasional SIPADES juga mempengaruhi kelancaran penggunaan aplikasi, sehingga implementasinya belum berjalan secara optimal.

Pembahasan

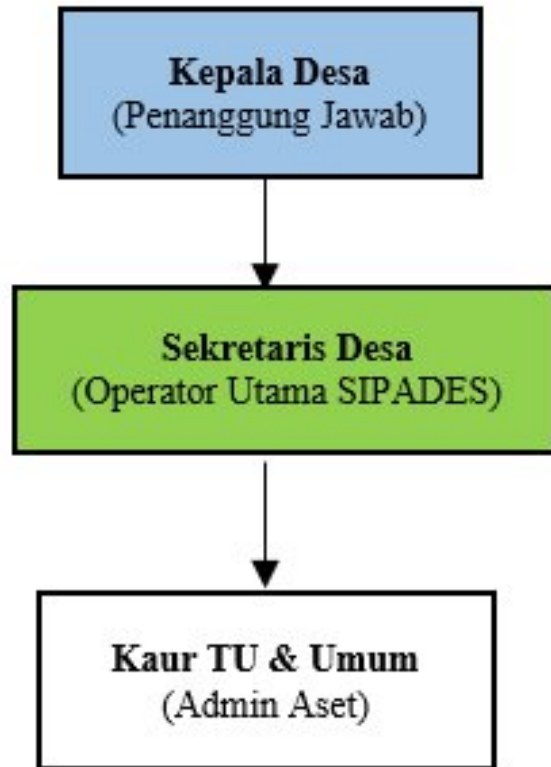
3. DISPOSISI

NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	PELATIHAN / KOMPETENSI
Widya Helita	S2	Pi Kepala Desa	Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa (Kemendagri, 2024)
Imam Fakhruddin	S1	Sekretaris Desa	Pelatihan pengoperasian aplikasi sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Versi 2.0 (Kecamatan Jabon, 2023) Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa (Kemendagri, 2024)
Dyana Puspita Sari	SMA	Kaur TU dan Umum	Pelatihan pengoperasian aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Versi 3.0 (BKD Sidoarjo, 2025) Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa (Kemendagri, 2024)

menunjukkan adanya komitmen yang cukup kuat dari perangkat desa dalam menjalankan kebijakan. Aparatur desa tetap berupaya melaksanakan pengelolaan aset secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut terlihat dari keterlibatan perangkat desa dalam kegiatan pelatihan SIPADES serta kesungguhan dalam mengoperasikan aplikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sekretaris Desa sebagai operator utama memiliki peran penting dalam menjalankan sistem dan memastikan data aset tetap tercatat dengan baik. Upaya menjaga tertib administrasi tetap dilakukan ketika aplikasi mengalami kendala. Perangkat desa melakukan pencatatan manual pada buku inventaris sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan aset desa. Adanya penandatanganan fakta integritas mencerminkan keseriusan aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan sesuai aturan. Keterlibatan pimpinan desa dalam pengawasan juga memperkuat konsistensi pelaksanaan di lapangan. Disposisi pelaksana yang positif menjadi faktor pendukung dalam implementasi SIPADES, terutama dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan aset, meskipun menghadapi keterbatasan teknis.

Pembahasan

4. STRUKTUR BIROKRASI



Struktur birokrasi dalam implementasi SIPADES di Desa Ketapang telah memiliki dasar yang jelas melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan aset desa. Struktur pelaksana terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggung jawab, Sekretaris Desa sebagai operator utama, serta perangkat desa lainnya yang mendukung proses pendataan aset. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan SIPADES masih terpusat pada Sekretaris Desa. Perangkat desa lainnya berperan dalam pengumpulan data aset sesuai bidang masing-masing. Kondisi ini menyebabkan beban kerja tidak merata dan proses penginputan data bergantung pada satu pihak. Koordinasi antar perangkat desa tetap berjalan dalam mendukung pengelolaan aset, terutama dalam penyediaan data dan verifikasi informasi. Pembagian peran yang lebih merata diperlukan agar proses pengelolaan aset dapat berjalan lebih efektif dan tidak bergantung pada satu operator. Struktur birokrasi yang telah terbentuk memberikan dasar yang cukup jelas dalam pelaksanaan kebijakan, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian dalam distribusi tugas dan koordinasi antar pelaksana.

Temuan Penting Penelitian

Implementasi SIPADES di Desa Ketapang menghasilkan beberapa temuan penting yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan.

- Terjadi kehilangan data aset pada saat pembaruan sistem dari versi 2.0 ke 3.0
- Jaringan internet yang tidak stabil mempengaruhi proses input dan pengelolaan data
- Pengelolaan aplikasi masih terpusat pada Sekretaris Desa sebagai operator utama
- Pencatatan manual tetap digunakan untuk menjaga tertib administrasi aset
- Tidak tersedia alokasi anggaran khusus untuk mendukung operasional SIPADES
- Sebagian aset desa belum terdata secara digital akibat kondisi wilayah terdampak lumpur Lapindo

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIPADES telah berjalan, dengan sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan aset desa.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan berbasis e-government di tingkat desa. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan aset melalui aplikasi SIPADES. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan SIPADES agar lebih efektif dan terstruktur, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa dan penerapan sistem pemerintahan berbasis digital.

Referensi

- [1] Aprillia Hartiningtyas and Ilmi Usrotin Choiriyah, “Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo,” *J. Publicuho*, vol. 7, no. 3, pp. 1558–1573, 2024, doi: 10.35817/publicuho.v7i3.517.
- [2] A. Fauzi, “Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah,” *J. Bina Mulia Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 218–233, 2022, doi: 10.23920/jbmh.v6i2.678.
- [3] I. Noviar and E. Priyanti, “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa,” *J. Pemerintah. Dan Polit. Univ. Indo Glob. Mandiri*, vol. 8, no. 3, pp. 213–220, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/2929/1976>
- [4] Rabiatul, Q. Mariah, and Raharso, “Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Implementation Success Evaluation of Village Asset Management System (SIPADES),” *J. Manaj. Aset Infrastruktur Fasilitas*, vol. 4, no. 1, pp. 33–42, 2020.
- [5] L. T. Pamungkas, E. W. DJ, and B. Widiyahseno, “Pengelolaan Aset Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo,” *Adm. Pemerintah. Desa*, vol. 2576, pp. 61–71, 2020, doi: 10.32669/village.
- [6] R. Y. Maulana and F. Bafadhal, “Provision of Access to Information Services Based on E-Government in the Village Government,” vol. 439, no. Ticash 2019, pp. 219–223, 2020, doi: 10.2991/assehr.k.200515.037.
- [7] Elzas, L. Puad, and R. Irawan, “Sistem Informasi Pengolahan Aset Desa Pada Kantor Desa Mandiangin Tuo,” *J. Akad.*, vol. 15, no. 2, pp. 8–14, 2023, doi: 10.53564/akademika.v15i2.919.
- [8] A. Adheitya Widaniyansyah, R. S. P. Martiningsih, and A. B. Suryantara, “Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa Kekerri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,” *J. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 4, no. 3, pp. 527–537, 2024, doi: 10.29303/risma.v4i3.1277.
- [9] R. U. Styaningsih, N. Destyarini, A. Aryono, and E. Elisanti, “Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” *AL-MANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 2205–2224, 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i2.3478.
- [10] N. U. Aprilia, *Determinan Perceived Usefullness dan Perceived Ease of Use pada Model Penerimaan Teknologi Aplikasi Sipades V.01*. 2020.

